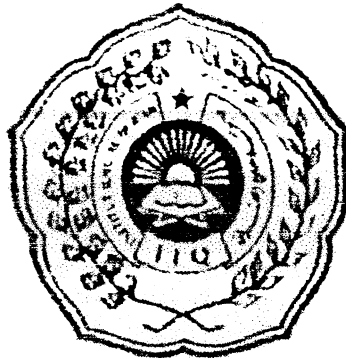


KONSEP NEGARA ISLAM
STUDI PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL-MAUDUDI

Oleh :

SOFINNIYAH GHUFRON

(94110128)



JURUSAN MU'AMALAH JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1422 H / 2001 M

**KONSEP NEGARA ISLAM:
STUDI PEMIKIRAN POLITIK ABUL A'LA AL-MAUDUDI**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah untuk Memenuhi
Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Syari'ah

Oleh:

SOFINNIYAH GHUFRON

NIP.: 94110128

Di bawah bimbingan:

DR. AHMAD MUNIF SURATMAPUTERA, MA

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1422 H./2001 M.**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "**Konsep Negara Islam: Study Pemikiran Politik Abul A'la al-Maududi**" telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta pada tanggal 19 Juli 2001. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) pada Jurusan Muamalah.

Jakarta, 2001

Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta



Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag.

Ketua Merangkap Anggota



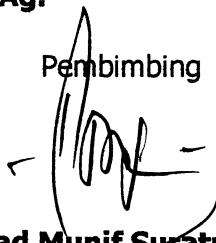
Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag.

Sekretaris Merangkap Anggota



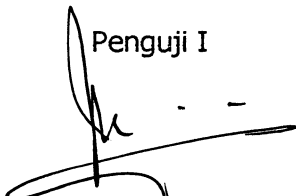
Dra. Muzayyanah

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Munif Suratma Putra, MA

Penguji I



Dr. Hj. Musyrafah Susanto

Penguji II



Dr. H. A. Chaeruddin, SH.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan skripsi yang berjudul "**Konsep Negara Islam: Studi Pemikiran Abul A'la al-Maududi**" ini dapat diselesaikan dengan baik, walau dalam pembahasan dan uraian yang masih sangat sederhana.

Shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Saw. sebagai pendobrak kegelapan yang membawa umat manusia kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar Ilahi.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik bantuan moril maupun materil, skripsi ini tidak akan dapat terwujud sebagaimana mestinya. Karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Maulana Hasanuddin, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta.
2. Bapak Dr. Ahmad Munif Suratmaputera, MA., selaku Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya kepada penulis.
3. Pimpinan Perpustakaan IIQ, Perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah, Iman Jama', Perpustakaan Nasional, yang telah memberikan fasilitasnya untuk meminjamkan buku-buku kepada penulis.

4. Bapak Rektor IIQ Jakarta beserta para dosen dan stafnya yang telah menyediakan fasilitas dan telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sejak penulis menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Penghargaan yang tulus penulis persembahkan kepada ayahanda HM. Ghufron Djadi dan ibunda Hj. Musrichah Adnan yang telah memberikan motivasi dan do'anya kepada penulis. Kepada kakanda tercinta (zainun Nasichah, Zamil, Rauf) "thanks a lot" untuk motivasi dan bantuan *finansial*-nya, juga untuk adikku (Kamal dan Ajib)
6. Teman-teman, Diana, anis, Rita, Ulfie (makasih atas persahabatan yang tulus), bang Syahrul dan kak Muslimin (makasih saran-sarannya), Uning yang selalu nganterin ke perpustakaan, trus... untuk Basyril dan fahmi (bantuin ngetik), ayink (minjemin komputernya), Noni (atas kritiknya), Khushushon Eep (editor) dan teman-teman yang tidak disebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, amien !

Penulis

Sofinniyah Ghufron

DAFTAR ISI

	Hal
HAL. PERSETUJUAN	i
HAL. PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM NEGARA ISLAM	9
A. Islam dan Negara	9
B. Hakekat dan Karakteristik Negara Islam	14
C. Negara Islam dan Sejarah Perkembangannya	21
1. Negara Islam pada Masa Rasulullah Saw.	21
2. Negara Islam pada Masa Khulafa' al-Rasyidin.....	25
3. Negara Islam Pasca Khulafa' al-Rasyidin	35
BAB III BIOGRAFI ABUL A'LA AL-MAUDUDI	38
A. Riwayat hidup dan Karya-karyanya	38
B. Kondisi Sosial Politik Masa Abul A'la al-Maududi	44
C. Al-Maududi dalam Pergumulan Politik di India dan Pakistan	54
BAB IV KONSEP NEGARA ISLAM: STUDY PEMIKIRAN POLITIK ABUI A'LA AI-MAUDUDI	58
A. Konsep Kedaulatan.....	58
B. Lembaga-lembaga Pemerintahan	70
C. Kewarganegaraan	77
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wacana tentang konsep negara Islam merupakan salah satu persoalan penting yang telah lama memancing debat dan kontroversi di kalangan umat Islam, sehingga tidak jarang perbedaan pandangan tentang hal tersebut mengundang perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri.

Sebenarnya bila dilihat dari sejarah Rasulullah sewaktu hidup beliau di Madinah, telah membangun sebuah negara yang dikepalai langsung oleh Rasulullah sendiri. Dalam hal ini para pemikir Islam berselisih pendapat mengenai nama untuk negara tersebut. Ada yang menyebutnya dengan "Negara Madinah", ada juga yang menyebutnya dengan "Negara Muhajirin", bahkan ada yang menyebutnya dengan "Negara Islam".¹ Terlepas dari kontroversi tersebut, yang jelas negara yang telah dibangun oleh Rasulullah syarat dengan nilai-nilai luhur yang tidak kalah dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara modern. Sebut saja misalnya: musyawarah, persamaan hak di depan hukum, keadilan dan lain sebagainya. Rasulullah sendiri tidak pernah mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang

¹Abdullah Azis Taba, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. ke-1, h.95

dijalankan merupakan sistem ideal yang harus diikuti oleh generasi sesudahnya. Akibatnya, muncul berbagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh umat Islam.

Adalah Abul A'la al-Maududi salah seorang pemikir politik Islam kontemporer yang banyak melahirkan ide-ide tentang politik Islam. Beliau dianggap salah seorang yang sangat menentang dominasi pemikiran dan implementasi politik Barat terhadap dunia Islam.

Bagi al-Maududi, dan mereka yang sehaluan dengan al-Maududi seperti: Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, dan Syekh Muhammad Rasyid Ridha, Islam bukan semata-mata sebagai agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan dan tata aturan antara manusia dengan Tuhan, tapi Islam menurut mereka merupakan agama yang serba lengkap dan komprehensif yang mengatur segala tata aturan kehidupan manusia, termasuk tata aturan dalam kehidupan bernegara.² Oleh karena itu, mereka menyerukan agar mempedomani konsep-konsep kenegaraan yang pernah dijalankan oleh Rasulullah dan apa yang telah dilakukan oleh para Khulafa' al-Rasyidun untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara bagi umat Islam.

Pemikiran politik Islam yang dikembangkan oleh kelompok tersebut di atas, seringkali dan bahkan diidentikkan dengan kelompok fundamentalis Islam, dan al-

²Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), Cet. ke-5, h. 1-2

Maududi adalah yang paling vokal dalam menyerukan ide-ide semacam itu. Untuk mendukung seruannya al-Maududi telah banyak melahirkan karya-karya politik menurut visi dan prespektif yang ia yakini dengan membentuk organisasi politik. *Jami'at al-Islami* merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 26 Agustus 1941 di Lahore yang bertujuan mewujudkan visi ideologi al-Maududi.³

Konsep kenegaraan al-Maududi berangkat dari pemahaman dan penafsirannya terhadap konsep *tauhid* yang menjadi misi dari kerasulan dan kenabian. Terdapat tiga dasar keyakinan atau anggapan yang melandasi pikiran-pikiran al-Maududi tentang kenegaraan menurut Islam:

Pertama, Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, yang mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Oleh karenanya, dalam bernegara umat Islam tidak perlu meniru sistem Barat, cukup kembali pada sistem Islam sebagaimana yang telah dijalankan dan dicontohkan pada masa *Khulafa' al-Rasyidun*.

Kedua, Kekuasaan yang tertinggi yang dalam istilah politik disebut kedaulatan adalah pada Allah. Dan manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan tersebut sebagai khalifah.

³Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan,1995), h.115

Ketiga, sistem politik Islam adalah sistem yang universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.⁴

Terhadap konsep kenegaraan yang dikembangkan oleh al-Maududi mendapat tanggapan dan reaksi dari berbagai kalangan. Sebagian orang memandangnya sangat kontroversial, idealis, elitis atau mengawang-awang, dan tidak melihat kenyataan yang ada. Sedangkan sebagian yang lainnya mendukung pemahamannya.

Terlepas dari sikap dan kontra terhadap pemikiran politik al-Maududi, pada sisi lain negara modern merupakan realitas terlepas apakah dipengaruhi oleh hegemoni kekuatan Barat atau yang dihadapi oleh negara-negara yang ada di dunia, baik Islam maupun lainnya. Negara modern yang dianggap sebagai bentuk negara yang terbaik untuk saat ini yang dapat mengakomodir segala problema kemasyarakatan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik-konflik yang akan timbul. Penegakannya atas nilai-nilai keadilan, persamaan, kebebasan, demokrasi dan sebagainya. Kenyataan yang ada membuktikan bahwa negara-negara Barat dan Amerika, terlepas dari adanya kekurangan, merupakan negara-negara yang paling *concern* terhadap isu-isu hak azasi manusia dan *liberalisme* dibandingkan negara-negara dunia ketiga.

⁴Munawir Sjadzali, *Op. Cit*, h.166

Al-Maududi dengan segala kegigihannya berusaha menggali konsep-konsep kenegaraan dari ajaran-ajaran Islam, baik dari *al-Qur'an* dan *al-Hadist* maupun warisan para *Khulafa' al-Rasyidun* dan ulama salaf. Sebagai seorang muslim ia ingin menyatakan bahwa dalam Islam juga terdapat konsep politik.

Berangkat dari uraian di atas, kajian terhadap pemikiran politik Abu A'la al-Madudi merupakan sesuatu yang sangat penting. Apakah konsep pemikiran politiknya terutama tentang konsep kenegaraannya berbeda dengan konsep negara modern yang ada selama ini. Untuk dapat menelaah persoalan tersebut secara lebih mendalam, maka penelitian ini mengambil judul: **"KONSEP NEGARA ISLAM (Study Pemikiran Politik Abul A'la al –Maududi)"**

B. RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH

Persoalan negara Islam merupakan persoalan yang cukup jelas, oleh karenanya supaya kajian ini lebih mendalam maka perlu perumusan masalah dengan jelas. Masalah pokok dalam kajian ini adalah: Bagaimana konsep negara Islam dalam pandangan al-Maududi?

Untuk lebih memudahkan menjawab permasalahan tersebut, maka kajian ini dibatasi pada:

1. Bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Islam?

2. Siapa pemegang kedaulatan dan bagaimana proses legitimasi kedaulatan tersebut?
3. Sejauh mana batas-batas kekuasaan politik bagi penguasa?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan:

1. Mendapat gambaran tentang kondisi sosial politik yang terjadi pada masa al-Maududi.
2. Mendapat gambaran yang tepat tentang pemikiran politik Abul A'la al-Maududi.

Hasi penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Pengayaan khazanah kajian keislaman terutama dalam bidang pemikiran politik Islam.
2. Pengembangan wacana Islam dan negara khususnya mengenai bentuk negara.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), karenanya data-data yang diambil bersumber dari pustaka baik yang berupa dokumen, naskah, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang dimaksud yaitu dengan

cara menelusuri sumber-sumber, karya-karya yang dihasilkan oleh al-Maududi sendiri, maupun karya-karya orang lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Sedangkan sumber dan metode pengumpulan data diperoleh dengan cara:

- Memanfaatkan fasilitas perpustakaan, baik yang ada dalam lingkungan IAIN maupun lainnya, untuk mendapatkan berbagai data yang terkait dengan penelitian ini.

Terhadap data-data yang sudah terkumpul akan disajikan dan dianalisa dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis* yaitu dengan mendeskripsikan data yang ada dan menelaahnya dengan maksud menemukan jawaban terhadap pokok permasalahan dan hubungan di antara bagian-bagian tersebut untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-bab yang sistematika pembahasannya ditempatkan secara kronologis menurut urutan babnya.

Bab pertama, memuat pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum negara Islam, yang berisi pengertian negara Islam dan dasar pembentukannya, hakekat dan karakteristik negara Islam dan sejarah perkembangan negara-negara Islam.

Bab ketiga, membahas tentang biografi Abul A'la al-Maududi, yang berisi daftar riwayat hidup dan karya-karyanya, kondisi sosial politik Abul A'la al-Maududi, dan al-Maududi dalam Pergumulan Politik di India dan Pakistan

Bab keempat, membahas tentang konsep negara Islam dalam pandangan politik Abul A'la al-Maududi, yang berisi konsep kedaulatan, lembaga-lembaga pemerintahan dan kewarganegaraan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang di dalamnya terdapat penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Abul A'la al-Maududi adalah salah seorang pemikir politik Islam pada abad modern ini, yang mempunyai pemikiran politik yang sangat "unik". Keunikan pemikirannya tampak dalam konsep kenegaraannya yang berangkat dari pemahaman dan penafsirannya terhadap konsep kedaulatan. Di saat manusia modern sedang mendengungkan dan bahkan mengagungkan kedaulatan rakyat (demokrasi) sebagai ideologi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, al-Maududi justru mengklaim bahwa konsep kedaulatan semacam itu bertentangan dengan ajaran Islam, bersifat *syaitaniyah* daripada *Ilahiyah*, bahkan ia menawarkan suatu konsep baru untuk politik Islam yaitu Teo-Demokrasi –suatu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi di mana manusia (rakyat) dalam pemerintahan semacam ini diberi kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan.

Berdasarkan pemahamannya terhadap konsep kedaulatan seperti yang diuraikan dalam skripsi ini, al-Maududi merumuskan konsep negara Islam sebagai berikut:

1. Pemegang otoritas dan souverinitas tertinggi ada pada Tuhan. Karena Tuhan sebagaimana yang digambarkan dalam al-Qur'an adalah pencipta, pengatur dan pemilik apa yang ada di alam ini. Di samping itu, Tuhan juga merupakan pemberi hukum sejati dan mempunyai kewenangan mutlak dalam legislasi, sekaligus sebagai sumber hukum.

2. Manusia, menurut al-Maududi hanyalah sebagai wakii Tuhan di muka bumi untuk melaksanakan kedaulatan itu dan harus tunduk kepada ketentuan atau hukum yang telah diberikan Tuhan.
3. Kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga badan atau lembaga, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di mana masing-masing memiliki tugas dan wewenang secara terpisah dan mandiri satu sama lainnya.
4. Sedangkan dalam hal kewarganegaraan, al-Maududi membaginya atas dua golongan yaitu golongan muslim dan golongan non muslim (*dzimmi*). Pembagian kewarganegaraan ini berimplikasi pada hak dan kewajiban warga negaranya, terutama dalam hak-hak politik kaum dzimmi.

B. Saran-saran

Dalam upaya membangun citra politik Islam yang egaliter dan demokratis diperlukan adanya rekonstruksi pemahaman ajaran keagamaan yang lebih mengarah kepada semangat kandungan atau kontekstual ajaran agama, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits Rasulullah Saw., seperti dalam konsep kedaulatan al-Maududi yang cenderung bersifat eksklusif. Misalnya, menempatkan orang Islam saja yang berhak memimpin negara. Ayat-ayat yang kelihatannya diskriminatif dan eksklusif tidak lagi dipahami secara parsial, misalnya ayat 55 surat al-Nur tidak dipahami sebagai ayat yang memberi legalitas kepada umat Islam saja yang berhak menjadi khalifah Tuhan, sekaligus yang berhak menjadi penguasa politik. Tetapi

juga harus melihat ayat lain yang menekankan semangat egalitarian dan demokratis yang telah ditunjukkan Rasulullah Saw. semasa hidupnya.

Dengan demikian, politik Islam tidak akan menjadi momok bagi orang Islam sendiri maupun orang lain luar Islam, dan Islam benar-benar akan tampil sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, dan terwujud dalam kenyataan kehidupan umat Islam sehari-hari, tidak hanya dalam tataran teoritis.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la al-Maududi, Abul, *Hukum dan Konstitusi: Konsep Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-4
- Abdullah Muhammad Bin Ismail al- Bukhari, Abu, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th, Jilid I, Juz II
- Adnan Amal, Taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1992, Cet. ke-3
- Ahmad Husaini, Waqor, *Sistem Masyarakat Islam*, (terjemahan), Bandung: Pustaka, 1993, Cet. ke-1
- Ahmad, Kurshid & Ishaq Ansari, Jafar, *Mawlana Sayyid Abu al-A'la al-Maududi: An Introduction to his Vision of Islam*
- Ahmad, Kurshid & Ishaq Ansyari, Jafar (Editor), "Islamic Prospectives: Study in Honour of Mawlana Sayyid Abu al A'la al-Maududi", Leicester: Islamic Foundation, 1980, Cet. ke-2
- Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Pembebasan*, (terjemahan), Yogyakarta: LKIS, 1993, Cet. ke-I
- Ali, Mukti, *Alam Pemikiran Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1996, Cet. ke-3
- As'ad, Muhammad, *Sistem Pemerintahan Islam*, (terjemahan), Bandung: Pustaka, 1995, Cet. ke-1
- Azis Thaba, Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Cet. ke-I
- Boswort, C. E. dkk. (Editor), *Encyclopaedia of Islam*, New Edition, Leiden: E.J Brill, 1991
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, h. 536
- Esposito, Jhon (Editor), *Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change*, New York: Syracuse University Press, 1980,
- F. Mas'udi, Masdar, *Islam Butuh Penyadaran Kultural secara Kritis*, Jakarta: Prisma, Mei 1995

- Hadi Pramono, Syechul, *Pemerintahan Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, Cet. ke-1
- J. Pulungan, Suyuthi, *Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Cet. ke-3
- J. Pulungan, Suyuthi, *Prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Javid Iqbal, Hakim, *Konsep Negara dalam Islam*, dalam Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (terjemahan), Bandung: Mizan, 1994, Cet. ke-2
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401, Cet. ke-1
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah*, (terjemahan), Bandung: Pustaka, 1993, Cet. ke-1
- Lapedus M. Lapedus, Ira, *A History of Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, Cet. ke-1
- M. Abu Zahro, *Membangun Masyarakat Islam*, (terjemahan), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, Cet. ke-1
- Ma'arif, M. Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1995), Cet. ke-2
- Madjid, Nurcholis, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992, Cet. ke-1
- Malayam Shah Shafiq, Muhammad, *State Islam City in the 20th Century: A Case Study of Pakistan, (Analysis of the Constitutional History of Pakistan*, Ann Arbor: UMI, 1982
- Muhammad bin Jarir al-Thabari, Abu Ja'far, *Jami' al-Bayan al-Ta'wil Ayatil-Qur'an*, Dar al-Fikr: 1984, vol.4. Juz.6
- Muhammad Said, Hakim, *Moralitas Politik: Konsep mengenai Negara*, dalam A.E. Priyono (ED), *Islam Pilihan Peradaban*, Yogyakarta: Sholahuddin Press, 1984, Cet. ke-1
- Nasution, Harun, *Teologi Islam, Aliran-aliran, Sejarah dan Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1972,
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam: Sejarah, Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, Cet. ke-12

- Nasution, Harun, *Sekitar Masalah al-Qur'an sebagai Sumber Utama Ajaran Islam*, Makalah t.t.
- Al-Quthub, Sayyid, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Beirut: Ihya at-Turas al-Arabi, 1967, Cet. ke-5, Jilid. VII
- Rahmena, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1995
- Rais, Amin, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1987, Cet. ke-1
- Rais, Amin, *Kata Pengantar dalam Abul A'la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1998, Cet. ke-7
- Rosenthal, E.I.J., *Islam in Modern National State*, Cambridge: Cambridge University Press, 1965
- Saddiqi, Nasheruddin, *Kebudayaan Islam di Pakistan dan India*, dalam Kennet W. Morgon, *Islam the Straight Path*, terjemahan Abu Salamah dan Chaidir Anwar dengan judul "Islam Jalan Tengah", Jakarta: Pustaka Jaya, 1986, Cet. ke-3
- Shihab ad-Din Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Asqalani, Abi al-Fadl, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, Bairut: Dar al-Ihya at-Turas, 1408 H., Cet. ke-2, Juz XII
- Shihab, M. Quraish, *Kandungan al-Qur'an*
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993, Cet. ke-5
- Smith, W. C., *Modern Islam in India: A Social Analysis*, New Delhi: Usha Publication, 1979, Cet. ke-2